



Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Pada Usaha Kerajinan Karawo

Lukfiah Irwan Radjak^{1*}, Falikhatun²

¹Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia; ^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96181, Indonesia.

¹lukfi_ah22@student.uns.co.id; ²faliefeuns17@gmail.com

*Corresponding author

doi.org/10.33795/jraam.v7i3.004

Informasi Artikel

Tanggal masuk	07-01-2025
Tanggal revisi	26-03-2025
Tanggal diterima	27-03-2025

Keywords:

SAK EMKM;
Accounting Literacy;
Karawo Craft MSMEs;
Financial Record-Keeping;
Policy Socialization.

Kata kunci:

SAK EMKM;
Literasi Akuntansi;
UMKM Karawo;
Pencatatan Keuangan;
Sosialisasi Kebijakan.

The Implementation of Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in Karawo Craft Businesses

Purpose: This study aims to examine the implementation of Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) among Karawo craft MSMEs in Gorontalo.

Method: A descriptive qualitative approach was employed, utilizing in-depth interviews with three MSME owners.

Findings: The results indicate that MSME actors' understanding of SAK EMKM remains limited due to insufficient socialization, non-accounting educational backgrounds, and non-independent use of the SIAPIK financial recording application.

Novelty: This study provides a specific focus on Karawo MSMEs and identifies key barriers to SAK EMKM implementation.

Contribution: The research contributes practical recommendations for enhancing socialization, training, and mentoring programs to improve the effective adoption of SAK EMKM.

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah pada Usaha Kerajinan Karawo

Tujuan: Untuk memahami implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada UMKM kerajinan Karawo di Gorontalo.

Metode: Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terhadap tiga pelaku UMKM.

Hasil: Menunjukkan pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dan latar belakang pendidikan non-akuntansi, serta penggunaan aplikasi SIAPIK yang belum mandiri.

Kebaruan: Fokus spesifik pada UMKM Karawo dan identifikasi hambatan implementasi SAK EMKM.

Kontribusi: Rekomendasi peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk mendorong penerapan SAK EMKM yang lebih efektif.



1. Pendahuluan

Seni karawo merupakan seni warisan turun-temurun yang umumnya dilakukan oleh kaum wanita Gorontalo. Jika mengacu pada proses kerjanya, seni karawo adalah sebuah teknik untuk membentuk ornamen atau ragam hias pada tekstil atau kain. Produk seni karawo berupa ornamen pada kain yang disebut dengan istilah ornamen karawo dan kain yang dihiasi dengan ornamen karawo disebut kain karawo, yang berarti kain yang diberi motif hias karawo [1]. Salah satu keunikan dari seni ini adalah keseluruhan proses kerja mulai dari penyulaman, yang dilakukan dengan menarik atau membuka benang-benang dari kain sehingga membentuk ornamen, dilakukan secara manual dengan keterampilan tangan [2], sehingga memiliki estetika seni yang tinggi dan menjadi produk artisional warga Gorontalo [3].

Sejak tahun 2010, karawo telah ditetapkan sebagai klaster komoditi unggulan yang didukung secara lintas sektor oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo karena berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi serta mendorong branding Gorontalo. Produk sulaman karawo yang diproduksi oleh UMKM memiliki potensi sebagai produk budaya yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan berbagai potensi ekonomi, termasuk pariwisata [4], [5]. Di balik potensi kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menantang, terutama pada sulitnya mendapatkan akses modal atau pembiayaan perbankan karena bank maupun lembaga keuangan meminta laporan keuangan UMKM sebagai syarat pengajuan akses modal maupun pembiayaan perbankan. Hal ini sulit untuk dipenuhi oleh para pelaku UMKM.

Melihat pentingnya penerapan akuntansi bagi UMKM, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) melalui DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik

UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016. Beberapa penelitian tentang pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan telah dilakukan oleh peneliti, di antaranya [6] menyebutkan bahwa pemahaman UMKM terhadap akuntansi dan SAK EMKM berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan sehingga pelaku UMKM sebaiknya mulai menerapkan pembukuan yang sesuai dengan SAK EMKM. Dalam penelitian yang dilakukan disebutkan bahwa kesalahan konseptual dalam pencatatan akuntansi terjadi karena UMKM tidak mengetahui dan memahami SAK EMKM [7]. Manajemen UMKM menyusun laporan kegiatan usahanya sesuai dengan persepsi mereka tentang laporan keuangan padahal laporan tersebut belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Manajemen menerbitkan nota transaksi agar tercipta ketertiban dan ketelitian dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan upaya dari UMKM berusaha untuk menyusun laporan yang setidaknya sudah mengarah pada kesesuaian pada standar akuntansi atau pembukuan akuntansi [8].

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam penerapan SAK EMKM, seperti kurangnya pemahaman terkait konsep penyajian laporan keuangan [9], kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang masih terbatas [10] [11], serta kurangnya sosialisasi terkait SAK EMKM [12]. Faktor-faktor ini dinilai berkontribusi signifikan terhadap hambatan dalam penerapan SAK EMKM, namun temuan lain memberikan pandangan yang berbeda, menyatakan bahwa sosialisasi dan kualitas sumber daya manusia tidak memengaruhi penerapan SAK EMKM [13], [14].

Perbedaan hasil tersebut mencerminkan adanya kompleksitas dalam memahami variabel yang memengaruhi penerapan SAK EMKM, sehingga memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam.

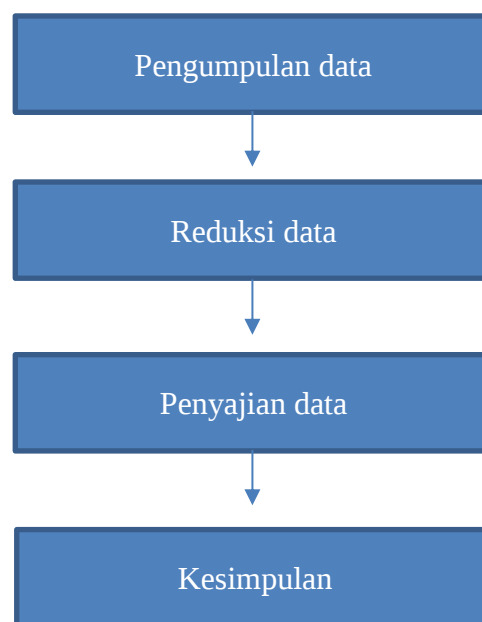
Penelitian terdahulu cenderung menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur hubungan antar faktor-faktor tersebut, tetapi metode ini mungkin kurang mampu menangkap nuansa sosial, budaya, dan struktur ekonomi yang memengaruhi UMKM.

Berdasarkan data Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo mencapai 105.509 pelaku UMKM yang tersebar pada tahun 2024. Melihat tingginya jumlah UMKM maka sudah seharusnya para pelaku UMKM memahami dan melaksanakan pemberlakuan SAK EMKM untuk menunjang usahanya. Berdasarkan harapan dan tujuan dari penerbitan SAK EMKM oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), maka peneliti berkeinginan untuk meneliti pemahaman para pelaku UMKM terhadap SAK EMKM serta apakah sudah diimplementasikan dalam laporan keuangannya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [15]. Dengan pendekatan penelitian deskriptif, bertujuan mendapatkan gambaran (deskripsi) lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti.

Penelitian ini mengkaji pemahaman pelaku UMKM tentang SAK EMKM. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM yang menjadi binaan salah satu lembaga keuangan di Gorontalo sebanyak 3 orang yang mewakili masing-masing UMKM, yaitu UMKM Bergina Karawo, UMKM Sumber Usaha Karawo, dan UMKM Orami. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung maupun melalui telepon dengan format wawancara semi terstruktur. Adapun metode analisis datanya dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Metode Analisis Data

3. Hasil dan Pembahasan

Kewajiban untuk membuat laporan keuangan bagi UMKM di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Pasal 153F yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha kecil dan menengah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang mulai diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2018 dengan tujuan untuk memandu UMKM dalam membuat laporan keuangan.

SAK EMKM dikembangkan sebagai standar mandiri yang lebih sederhana dibanding SAK pada umumnya yang berfokus pada transaksi keuangan dasar yang sering terjadi pada lingkungan entitas mikro, kecil dan menengah. Dengan adanya standar ini diharapkan UMKM lebih maju

dan mandiri dalam menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan usahanya. Mengingat informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal untuk memperoleh kredit dari bank [16], tujuan internal usaha seperti pengambilan keputusan pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, perhitungan biaya produksi, evaluasi kinerja, kontrol biaya, meningkatkan produktivitas dan masih banyak manfaat lainnya [17]. Dengan demikian diharapkan dengan adanya SAK EMKM akan meningkatkan profesionalitas dari UMKM. Menurut SAK EMKM paragraf 3.9, laporan keuangan minimal yang harus disusun oleh entitas terdiri dari: 1) laporan posisi keuangan; 2) laporan laba rugi; dan 3) catatan atas laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan minimum ini bertujuan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi standar yang berlaku, sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dan praktis. Namun, jika entitas merasa bahwa informasi tambahan dapat memberikan manfaat lebih bagi pengguna laporan keuangan, maka entitas diperkenankan untuk menyajikan komponen laporan keuangan lainnya, seperti laporan arus kas yang dapat meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Dengan demikian, fleksibilitas yang diberikan dalam SAK EMKM memungkinkan entitas untuk menyesuaikan penyajian laporan keuangannya sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

UMKM saat ini sedang dalam tren yang positif dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahun. Tren ini berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Salah satu peran UMKM bagi perekonomian Indonesia yaitu kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, tahun 2020 kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Dalam konteks

ekonomi lokal, UMKM berperan sebagai motor penggerak yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga keluarga pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga [18]. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi pada perekonomian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan. Berdasarkan modal usaha untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, Usaha mikro memiliki modal usaha hingga paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) hingga Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan yang sama. Berdasarkan hasil penjualan tahunan, Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan hingga paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) hingga paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Sementara Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) hingga paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Badan Pusat Statistik menggolongkan usaha lebih spesifik berdasarkan sektor usaha. Pada sektor industri, penggolongan dilakukan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro mempekerjakan 1-4 orang dan biasanya beroperasi dalam skala kecil dan informal seperti usaha rumahan. Usaha kecil mempekerjakan 5-19 orang dengan struktur

organisasi yang lebih terorganisir dibanding usaha mikro. Usaha menengah mempekerjakan 20-99 orang dan mulai berorientasi pada pasar yang lebih luas. Pada sektor konstruksi, penggolongan dilakukan berdasarkan kualifikasi usaha dan nilai satu pekerjaan konstruksi. Usaha mikro biasanya berbentuk usaha perorangan yang menangani proyek-proyek kecil. Usaha kecil diklasifikasikan sebagai K1, K2, atau K3 dengan cakupan pekerjaan kecil hingga menengah. Usaha menengah dikategorikan menjadi M1 dengan nilai pekerjaan konstruksi hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan M2 dengan nilai pekerjaan hingga Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), dengan cakupan pekerjaan yang lebih besar dan membutuhkan modal serta sumber daya yang lebih signifikan. Sementara itu, Pada sektor perhotelan, penggolongan dilakukan berdasarkan omset tahunan. Usaha mikro merupakan hotel non-bintang dengan omset maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang biasanya menawarkan pelayanan sederhana. Usaha kecil adalah hotel non-bintang dengan omset tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan memiliki fasilitas yang lebih baik dengan skala operasional yang lebih besar dibandingkan usaha mikro. Sedangkan Usaha menengah mencakup hotel-hotel berbintang 1 hingga 5 dengan omset tahunan mencapai Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) yang memiliki standar pelayanan yang lebih tinggi, baik untuk lokal maupun internasional [19][20].

Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terkait ukuran dan skala usaha, sehingga pemerintah dapat memberikan kebijakan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kategori.

Pemberdayaan UMKM menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip pemberdayaan UMKM, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV,

mencakup penumbuhan kemandirian, kewirausahaan, serta kebersamaan dalam membangun usaha yang berdaya saing. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga didasarkan pada kebijakan publik yang transparan, berkeadilan dan berorientasi pada potensi daerah. Tujuan akhirnya menciptakan struktur ekonomi yang seimbang, menumbuhkan UMKM agar lebih mandiri dan tangguh serta meningkatkan perannya dalam menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi motor penggerak perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi besar dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.

UMKM usaha karawo yang ada di Gorontalo merupakan wujud pelestarian budaya lokal melalui bordir tradisional khas daerah. Awal mula usaha dari masing-masing informan cukup beragam dalamnya memulai usahanya tahun 2004, 2017 dan 2019. Usahanya berkembang dengan melibatkan pengrajin lokal untuk memproduksi kain dan pakaian berbahan karawo. Seiring berjalannya waktu beberapa pelaku usaha mulai melakukan inovasi mulai dari bahan maupun motif karawo yang digunakan. Usaha karawo ini memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di komunitas sekitar. Selain itu pelaku usaha ini aktif mengikuti program-program UMKM binaan Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak hanya berfokus pada wawancara sebagai metode utama tetapi juga isi dari wawancara tersebut yang dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu: pemahaman terhadap SAK EMKM dan implementasi pencatatan laporan keuangan. Dalam wawancara, peneliti berinteraksi langsung dengan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hasil wawancara tentang pemahaman SAK EMKM menunjukkan bahwa :

Untuk akuntansi sendiri saya belum terlalu paham karena saya lulusan pendidikan guru yang bukan akuntansi. Untuk sosialisasinya belum pernah kalau terkait SAK EMKM, tapi

untuk pelatihan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi SIAPIK dari Bank Indonesia itu sudah pernah, karena kebetulan UMKM kami alhamdulillah termasuk UMKM binaan dari Bank Indonesia. (Wawancara UMKM A)

Hampir sama dengan penyampaian A:

Saya belum pernah mendengar standar itu, seperti apa sih itu? Padahal saya sering ikut pelatihan-pelatihan kayaknya belum ada yang seperti itu dari BI. Akuntansi itu kan aduuuhhhh susah banget hhhh... ini baru-baru pelatihan di BI ekspor impor sakit kepala, langsung ibu bilang sama apa eee depe apa yang dari Jakarta itu. Bilang "ee pak saya tidak mampu menyelesaikan ini tugas," saya memang cuma SD, mereka maklumi, yang penting saya itu cuma cari pengalaman ikut pelatihan ini. (Wawancara UMKM B)

Senada dengan informan C:

Saya belum pernah mendengar standar itu, dan saya tidak paham sama sekali sih dengan standar itu. Kalau sosialisasi terkait itu sih belum, cuma kalau untuk sistem laporan keuangan, so pernah sih dari bank karena memang binaan Bank Indonesia, jadi kemarin itu saya sempat diajarkan tentang SIAPIK laporan keuangan. Cuma memang karena saya basic-nya bukan akuntansi dan itu depe pelaporan sangat sistematis jadi sulit untuk saya memahami itu. (Wawancara dengan UMKM C)

SAK EMKM dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana dan relevan, namun kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami standar ini. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan

pencatatan keuangan secara manual dan sederhana tanpa mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan informan variatif dan informan belum pernah mengetahui terkait SAK EMKM. Jika untuk pelatihan pencatatan keuangan atau pelatihan ekspor impor mereka sering mengikuti karena UMKM mereka adalah binaan dari salah satu lembaga keuangan bank yang ada di Gorontalo.

Para pelaku UMKM masih menunjukkan keterbatasan dalam memahami akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pentingnya penggunaan informasi tersebut bagi perusahaan [21]. Hal seperti ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan sumber daya manusia di UMKM tersebut [22]. Agar mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan di Indonesia, UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi keuangan. Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan paling sedikit mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta catatan atas laporan keuangan [23]. Dalam konteks ini, sosialisasi SAK EMKM menjadi sangat penting sebagai upaya peningkatan literasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM. Melalui sosialisasi yang efektif, UMKM dapat lebih memahami manfaat penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan SAK EMKM secara utuh. Sosialisasi ini juga berperan sebagai jembatan untuk mengatasi keterbatasan pemahaman yang disebabkan oleh rendahnya latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi, sehingga pelaku UMKM dapat lebih siap dalam mengelola dan melaporkan kondisi keuangan usahanya secara transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan variabel pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM [24]. Berikut ini

adalah hasil wawancara terkait penerapan laporan keuangan pada entitas masing-masing.

Untuk pencatatannya awalnya menggunakan sistem manual kemudian disalin ke aplikasi SIAPIK tersebut. Yang lengkap gitu, ada laba rugi, neraca, arus kas, laporan posisi keuangan terakhir. Tetapi yang melakukan pencatatan adalah orang yang sewa untuk buat laporan. (Wawancara UMKM A)

Senada dengan informan A, sebagai berikut:

Untuk pencatatan ada yang manual, ada yang kalau laporan tiap tiga bulan itu tidak terlalu tahu betul, sudah ada pelatihan. Cuma kalau mau bikin laporan di SIAPIK dibantu cucu mau bantu bikin. Kalau manual sih ada kalanya tidak rutin, cuma kita kan kalau melihat penjualan itu cuma minta rekening koran di BRI atau di BSI karena torang pe pembayaran paling banyak di situ. Di situ kan dapat tahu tiap bulan, memang tidak ada yang gagal kan di BRI itu dengan di QRIS, tetap ada di rekening koran. Kalau pencatatan manual ada yang ibu tidak mo dapa tulis karena ti ibu kan ada kalanya habis ba jual lupa-lupa ba tulis, mau suruh sama dorang ba tulis kadang anak-anak tiyali, tapi ada pembukuan dari tahun 2009 masih ada. (Wawancara UMKM B)

Jawaban informan C adalah

Pencatatannya masih manual sih. Jenis laporannya tidak ada karena hanya catatan biasa saja. Pencatatan aset juga belum sih, torang belum melakukan pencatatan aset. Untuk laporan laba rugi sih e belum pernah buat sih dan untuk besaran modal yang

digunakan adalah sebelumnya kan torang kan so analisis terkait dengan harga bahan bakuan, kalau karawo itu kan harga bahan baku cuma berputar-putar di benang sama kain-kain, jadi torang so tahu harga benang harga kain, sehingga untuk modal itu torang so bisa prediksi berapa dengan untuk penjualan. Misalnya untuk penjualan kain torang bisa prediksi torang pe, torang so tahu duluan depe harga kain itu berapa-berapa begitu sih. Jadi menganalisis dulu sih. Jadi untuk harga jual diprediksi sendiri. (Wawancara UMKM C)

Pencatatan yang akurat dan sistematis menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan. Setiap individu atau organisasi memiliki metode pencatatan yang berbeda, baik secara manual maupun menggunakan sistem digital. Dalam konteks ini, penggunaan SIAPIK menjadi salah satu solusi untuk membantu pencatatan laporan keuangan. Namun, implementasi sistem ini di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam cara pengguna melakukan pencatatan dan penginputan data.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan dapat disimpulkan bahwa informan telah melakukan pencatatan laporan keuangan manual kemudian diinput pada aplikasi SIAPIK. Pelaku pencatatan bervariasi, ada yang melakukan pencatatan sendiri namun masih sangat sederhana, ada yang melakukan pencatatan sendiri untuk pencatatan manual tetapi ketika menginput di aplikasi SIAPIK membutuhkan bantuan orang lain, dan ada juga yang pencatatan keuangannya dilakukan oleh pihak ketiga.

Laporan keuangan menjadi dasar dalam menilai atau menentukan posisi keuangan suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga berperan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban,

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Laporan keuangan juga dapat digunakan dalam menganalisis prospek keberlanjutan usaha perusahaan di masa mendatang [25]. Pelaku UMKM diharapkan dapat melakukan pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku guna mengelola keuangan sehingga dapat mengetahui keadaan keuangan dari usaha yang dijalankan [26]. UMKM memerlukan pencatatan keuangan yang rinci sesuai dengan kebutuhan operasionalnya, yakni laporan keuangan yang berpedoman pada SAK EMKM. Semakin besar omzet yang diperoleh, maka semakin tinggi pula kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Dengan demikian, pengusaha atau pelaku UMKM dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai aktivitas bisnisnya melalui laporan keuangan yang tersedia [27].

Tabel 1. Menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat pemahaman ini bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar yang saling berkaitan. Faktor utama yang teridentifikasi adalah kurangnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dirancang secara efektif untuk memperkenalkan dan menjelaskan SAK EMKM kepada pelaku usaha. Dalam prakteknya banyak pelaku UMKM belum pernah menerima informasi atau edukasi resmi terkait standar tersebut, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung oleh instansi terkait maupun pelatihan teknis yang difasilitasi oleh lembaga keuangan, perguruan tinggi atau dinas koperasi dan UMKM. Pelaku UMKM kebanyakan berasal dari latar belakang pendidikan nonformal atau memiliki jenjang pendidikan yang rendah sehingga akses dan kemampuan untuk memahami konsep serta terminologi dalam akuntansi menjadi terbatas. Hal ini menghambat mereka dalam mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penerapan SAK EMKM secara maksimal.

Tabel 1. Hasil Reduksi Data

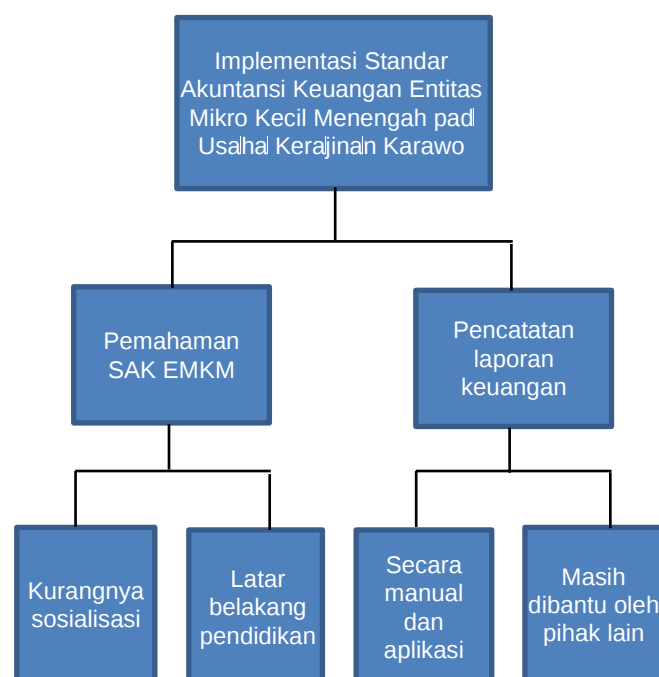
Pertanya an	Jawaban Informan		
	Informan A	Informan B	Informan C
Apa yang Anda ketahui tentang Standar Akuntan si Keuanga n Entitas Mikro Kecil Menenga h?	Belum mengetahui tentang standar tersebut dan latar pendidikan bukan dari akuntansi serta sosialisasi terkait SAK EMKM belum pernah diikuti.	Belum pernah mendengar standar tersebut sebelumnya, apalagi dengan latar belakang pendidikan SD. Sering mengikuti berbagai pelatihan, namun belum pernah ada yang membahas tentang SAK EMKM karena pendidikan hanya SD.	Belum pernah mendengar tentang standar tersebut. Sosialisasi ya pun belum pernah ikut, apalagi latar belakang keilmuan bukan dari akuntansi.
Bagaimana pencatatan laporan keuangan di UMKM bapak/ibu?	Pencatatan keuangan lengkap dilakukan secara manual kemudian dipindahkan ke aplikasi SIAPIK oleh pihak yang disewa.	Pencatatan keuangan manual tidak rutin dan pencatatan menggunakan SIAPIK didampingi keluarga karena belum mahir menggunakan aplikasi tersebut.	Pencatatan keuangannya hanya catatan sederhana. Hanya berupa keluar masuk dana.

Pencatatan laporan keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menerapkan metode pencatatan secara manual. Metode ini biasanya meliputi pencatatan sederhana atas transaksi kas masuk dan keluar, tanpa klasifikasi yang sesuai dengan struktur laporan keuangan yang distandarkan. Meskipun ada upaya untuk beralih ke sistem digital dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan seperti SIAPIK namun

penggunaanya belum optimal. Pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut karena belum sepenuhnya memahami cara kerja dan manfaat penggunaan sistem pencatatan berbasis digital. Tidak jarang ditemukan pelaku usaha yang hanya mencatat transaksi berdasarkan kebutuhan sesaat atau untuk keperluan internal semata, tanpa menyusun laporan yang lengkap seperti neraca, laporan laba rugi atau arus kas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teknis tentang tata cara pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar, sehingga membuat pelaku usaha cenderung menganggap proses tersebut sebagai hal yang rumit dan tidak perlu.

Temuan ini menggambarkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM. Upaya peningkatan ini tidak hanya melalui penyediaan pelatihan teknis, tetapi juga diperlukan pendekatan yang bersifat praktis dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha. Pendampingan secara berkelanjutan dalam penggunaan aplikasi seperti SIAPIK juga perlu diperkuat agar pelaku UMKM dapat secara bertahap meningkatkan kemandirian dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, sehingga usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan dan akuntabel.

Penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan metode lainnya. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan menggunakan bagan sebagaimana yang dapat dilihat di gambar 2. Hasil analisis data ditemukan beberapa kesimpulan yang terkait dengan pemahaman SAK EMKM pelaku UMKM Karawo meliputi: kurangnya sosialisasi terkait SAK EMKM sehingga pemahaman akan standar akuntansi ini sangat terbatas serta latar belakang pendidikan atau keilmuan yang tidak relevan dengan akuntansi membuat mereka kurang mengetahui tentang informasi keuangan, lebih khusus lagi SAK EMKM.



Gambar 2. Penyajian data hasil penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rismawandi, dkk [13] yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil pelaku UMKM masih cenderung mengabaikan pentingnya SAK EMKM karena minimnya informasi yang mereka terima terkait penyusunan laporan keuangan usaha. Akibatnya, banyak yang menganggap pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM sebagai sesuatu yang sulit, sehingga perlu sosialisasi untuk memperkenalkan SAK EMKM agar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang baik tentang standar yang berlaku serta informasi keuangan yang dihasilkan yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Sebanyak 3% dari total responden tidak setuju untuk menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UMKM disebabkan oleh ketidaktahuan tentang manfaat penerapan standar EMKM bagi manajemen UMKM [28]. Pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM meliputi: pencatatan keuangan belum sepenuhnya rutin menggunakan aplikasi SIAPIK, bahkan ada yang masih menggunakan pencatatan sederhana dan

untuk pengaplikasian SIAPIK pelaku usaha belum mandiri dalam menggunakannya. Seperti halnya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh [29], pelaku UMKM masih melakukan pencatatan sederhana berupa pencatatan pengeluaran dan penerimaan disebabkan oleh pencatatan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan kurang memahami penyusunan laporan sesuai dengan standar.

4. Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman pelaku UMKM Karawo terhadap SAK EMKM masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Latar belakang pendidikan atau keilmuan pelaku UMKM yang umumnya tidak relevan dengan bidang ilmu akuntansi turut menjadi faktor penghambat. Terkait dengan praktik pencatatan keuangan, sebagian pelaku UMKM telah berupaya untuk beralih dari sistem manual ke penggunaan aplikasi digital seperti SIAPIK. Pencatatan masih dilakukan secara tidak rutin dan sebagian pengguna masih bergantung pada pendampingan pihak luar karena belum memiliki kemandirian dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Bahkan, sejumlah UMKM masih tetap menggunakan metode pencatatan sederhana yang hanya mencatat transaksi keluar-masuk dana umum tanpa klasifikasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sumber informan. Informasi yang diperoleh semata-mata bersumber dari pelaku UMKM, sehingga belum mampu menggambarkan pandangan yang lebih luas dan dalam mengenai ekosistem penerapan SAK EMKM secara menyeluruh. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan informan, tidak hanya melibatkan pelaku UMKM tetapi juga pihak-pihak terkait seperti lembaga keuangan, instansi pemerintah pembina UMKM, serta akuntan pendamping

atau fasilitator lapangan. Dengan melibatkan berbagai perspektif, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kendala, kebutuhan dan potensi penerapan standar akuntansi keuangan di kalangan UMKM, khususnya dalam konteks lokal seperti pengrajin karawo di Gorontalo

Daftar Rujukan

- [1] Sudana IW. Seni Karawo Gorontalo : Bentuk Estetik dan Konsep Pengembangan. 2019.
- [2] Maryuni Maryuni, Yahiji K, Yusuf SD. Pengembangan Seni Karawo dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gorontalo. *Al-Buhuts* 2021;17:65–74.
<https://doi.org/10.30603/ab.v17i1.2219>.
- [3] Mardiana A, Mokoagow IA, Nur M, Labatjo R. Jurnal Mirai Management Dinamika Perkembangan Seni Karawo Terhadap Perekonomian di Gorontalo. *J Mirai Manag* 2023;8:615–23.
- [4] Viozzy. Pemerintah Gandeng Seluruh Stakeholder Bawa Karawo Gorontalo Semakin Dilirik Pasar Global. *MERDEKANEWS.CO* 2024.
<https://m.merdekanews.co/read/32318/Pemerintah-Gandeng-Seluruh-Stakeholder-Bawa-Karawo-Gorontalo-Semakin-Dilirik-Pasar-Global>.
- [5] Lagalo AMS. Kerajinan Sulaman Karawo Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus Di Provinsi Gorontalo (Kasus Sentra Kerajinan Sulaman KARAWO). *TULIP Tulisan Ilm Pariwisata* 2018;1:1–26.
- [6] Afriansyah, Berlian; Niarti, Upi; Hermelinda T. Analysis Of The Implementation Of The Preparation Of Financial Statements Based On Micro, Small And Medium Entity Accounting Standards (Sak EMKM). *J Saintifik (Multi Sci Journal)* 2019;19:25–30.
- [7] Suwondo S. Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus

- pada UMKM CV. NELL&TMQ PERSADA MANDIRI). AKUNSIKA J Akunt Dan Keuang 2021;2:1–7. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v2i1.2284>.
- [8] Purba MA. Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam. J Akunt Bareleng 2019;3:55–63. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1219>.
- [9] Salmiah N, Tri S, Intan N, Program A, Akuntansi S, Ekonomika F, et al. Pemahaman Pelaku Umkm Terhadap Sak Emkm: Survey Pada Umkm Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Pekanbaru. Akunt Dewantara 2018;2:194–203.
- [10] Utari R, Harahap I, Syahbudi M. Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. J Ilm Akunt Kesatuan 2022;10:491–8. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1449>.
- [11] Martha S, Haryati T. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Teknologi Informasi, dan Ukuran Usaha terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM Kafe di Surabaya. Reslaj Relig Educ Soc Laa Roiba J 2022;5:418–28. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i2.1527>.
- [12] Janrosl VS. Analisis Persepsi Pelaku UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM terhadap Diberlakukannya Laporan Keuangan yang Berbasis SAK EMKM. J Akunt Keuang Dan Bisnis 2018;11:97–105.
- [13] Rismawandi R, Lestari IR, Meidiyustiani R. Kualitas SDM, Persepsi Pelaku UMKM, Pemahaman UMKM, Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM. Owner 2022;6:580–92. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.608>.
- [14] Wulandari D, Arza FI. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAK EMKM pada UMKM Kota Padang. J Eksplor Akunt 2022;4:465–81. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.535>.
- [15] Maleong LJ. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya (Rosda); 2021.
- [16] Widyaningrum I, Purwanto A. Analisis Penerapan Sak-Emkm, Perencanaan Pajak, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Dan Persepsi Pelaku Usaha Atas Tujuan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm 2022;11:1–12.
- [17] Adino I. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Umkm Terhadap SAK EMKM: Survey Pada UMKM Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Pekanbaru. J Akunt Kompetif 2019;2:84–94.
- [18] Purba ML, Sucipto TN. Potensi Dan Kontribusi Umkm Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. J Mutiara Manaj 2019;4:430–40.
- [19] Statistik BP. Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 Indonesia Result Of Establishment Listing Economic Census 2016. 2017.
- [20] Bahri A, Mulbar U, Suliana A. Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. J Inov Dan Pelayanan Publik Makassar 2019;1:37–53.
- [21] Smallbone D, Welter F. Conceptualising entrepreneurship in a transition context. Int J Entrep Small Bus 2006;3:190–206. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2006.008928>.
- [22] Mutiah RA. Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM. Int J Soc Sci Bus 2019;3:223. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21000>.
- [23] Sholikin A, Setiawan A. Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora). JIFA (Journal Islam Financ Accounting) 2018;1:35–50. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1441>.

- [24] Mubiroh S, Ruscitasari Z. Implementasi SAK EMKM dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Kredit UMKM. *Berk Akunt Dan Keuang Indones* 2020;4:1. <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.15265>.
- [25] Nuvitasari A, Citra Y N, Martiana N. Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Int J Soc Sci Bus* 2019;3:341. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>.
- [26] Simanjuntak N, Sumual TEM, Bacilius A. Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Berdasarkan Sak-Emkm. *J Akunt Manad* 2021;1:35–44. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.626>.
- [27] Silvia B, Azmi F. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pengusaha Umkm Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm. *J Anal Bisnis Ekon* 2019;17:57–73. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2745>.
- [28] Zulfikar R, Astuti KD, Ismail T. Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in Indonesia: Factors, and Implication. *Qual - Access to Success* 2022;23:128–43. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.189.15>.
- [29] Hamongsina K, Sumual FM, Tala OY. Analisis Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada KM.Sirene). *J Akunt Manad* 2022;3:376–86. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3401>.